



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAMBANG SULISTYONO**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA**
IV
3. NHK : **129614**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/250 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 3.400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 710.000.000

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA 1.8 / MINIBUS Tahun 2011,
HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV 1.5CV / MINIBUS Tahun 2017, HASIL
SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOTOR, YAMAHA XSR155 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
30.000.000
4. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
320.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 290.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 304.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.704.000.000

III. HUTANG Rp. 700.399.768

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.003.600.232

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkp.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MIZAN ABIDI
2. Jabatan : PELELANG AHLI MADYA KPKNL JAKARTA IV
3. NHK : 155499

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.415.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 167 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 605.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 610.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **264.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA NMAX MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 18.500.000
2. MOBIL, SUZUKI ERTIGA MINIBUS/MANUAL Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
3. MOTOR, HONDA X1H02N32L1 AT/SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000
4. MOTOR, YAMAHA FILANO BJM A/T / SOLO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
5. MOTOR, HONDA F1C02N46L2 AT / SPD.MOTOR Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **239.200.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **247.484.759**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----

Rp. 3.166.184.759

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.166.184.759

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.